

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jalan Karya Utama No. 4

Nomor Telepon : 7951076

Website : diskopukm.deliserdangkab.go.id

E-mail : diskopds@gmail.com


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas. Meskipun demikian DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

LUBUK PAKAM, Februari 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG


ADELA SARI LUBIS, S.Tr. Keb., M.K.M
NIP. 19711111 199303 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	5
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	9
BAB III.....	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja.....	16
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	17
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	17
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	19
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	21

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	22
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	27
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	28
3.2 Realisasi Anggaran	38
BAB IV	42
PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	7
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	9
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	10
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	11
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	17
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	20
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Kinerja	21
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	22
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	27
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	28
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan BUPATI Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH mempunyai tugas :

Membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 8.888.202.085
APBD	Tahun 2024	Rp10.190.569.696

Sumber : DPPA T.A 2023 dan DPPA T.A 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH adalah meningkatkan kinerja koperasi dan usaha mikro. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
					2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	65.04	65.05	65.06	65.07
	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	83.07	85.33	85.79	85.83
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	2.1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	85	86	88.8
	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	84	86	88	87

Sumber : Cascading DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024 :

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	1.1 Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase	Usaha mikro yang berhasil meningkatkan penjualan dan/ atau modal ke kriteria di atasnya	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas / Total Usaha Mikro Naik Kelas *100%	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	2.1 Persentase Koperasi Aktif	Persentase	Menggambarkan perbandingan kondisi koperasi aktif dengan koperasi yang terdata yang ada di Kabupaten Deli Serdang	Persentase Koperasi Aktif / Total Koperasi *100%	Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Hasil Survei	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	3.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	Penilaian yang dilakukan terhadap Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Hasil Survei	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase	65.04
	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	83.07
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	84

Sumber : Rencana Kerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tahun 2024

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	65.04
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	83.07
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
4	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	84

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH :

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan	82
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan	80
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	27
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	5
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Olahraga Lengkap	0
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	41
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	46
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	7
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	804
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor	100
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	0
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	3
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	0
1.5.4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat Operasional	0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	90
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Jasa Telepon/Internet,	3

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor	7
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	3
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung dan Halaman	1764
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	56
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	355
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	100
2.1.1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	14
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai	25

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kesihatannya	
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengelola yang bersertifikat	50
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pengetahuan tentang perkoperasian	40
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	40
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Koperasi Yang Meningkat	50
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50
5.1.2	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaannya Daerah	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota	10

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kabupaten/Kota		
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	80
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	645
6.1.1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	125
6.1.2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	440
6.1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80
6.1.4	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	57
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	260
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Skala Usaha	70
7.1.1	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	70

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	65.04	52.34	80.47	Tinggi	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
2	Meningkat	Persentase	83.07	80.95	97.45	Sangat	Bidang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	nya Koperasi Aktif	Koperasi Aktif				Tinggi	Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	88.5	107.92	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	84	68.19	81.17	Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sumber : *Capaian IKU Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Naik Kelas, realisasi sebesar 52.34% dan memperoleh nilai capaian sebesar 80.47% dari target. Usaha mikro yang berhasil meningkatkan penjualan dan/ atau modal ke kriteria di atasnya dengan parameter usaha mikro tersebut sudah memanfaatkan teknologi, menggunakan sistem pemasaran online, memiliki legalitas

usaha, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki *packaging* (kemasan) yang menjual, fokus kepada pelayanan dan adaptif. Kemudian untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif, realisasi sebesar 80.95% dan memperoleh nilai capaian sebesar 97.45% dari target. Hasil ini diperoleh dari persentase koperasi aktif dibagi total koperasi dikali 100%. Evaluasi ini menggambarkan perbandingan kondisi koperasi aktif dengan koperasi yang terdata yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Parameter ini digunakan untuk menurunkan pinjaman-pinjaman yang menjamur dimasyarakat dengan bunga yang tinggi. Sedangkan yang disebut sebagai koperasi aktif yakni koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Kemudian untuk evaluasi terhadap survey indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, diperoleh realisasi 88.5 %. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang diberikan diawal Tahun 2025 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang. Dan evaluasi indikator kinerja yang terakhir yaitu Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, dimana realisasi yang diperoleh sebesar 68.19%. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2024 yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	62.62	63.06	62.41	65.04	52.34	80.47
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	77.11	77.5	80.90	83.07	80.95	97.45
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.38	79.87	86.04	82	88.5	107.92
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81.07	84.61	78.22	84	68.19	81.17

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian penjelasan tabel:

Realisasi tiap indikator kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami perubahan naik turun (fluktuasi). Yang dimana terdapat beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan dan terdapat pula beberapa indikator kinerja yang mengalami penurunan. Namun demikian, capaian masing-masing indikator kinerja tersebut sudah sangat baik mencapai >80%.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH periode 2022-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	52.34	65.04	80.47
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	80.95	83.07	97.45
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.5	82	107.92
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	68.19	84	81.17

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian penjelasan tabel :

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis sangat tinggi walaupun ada beberapa indikator kinerja tidak mencapai 100% tetapi angka pada capaian sudah menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah berjalan dengan baik.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	65.04	52.34	80.47	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas pada tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan jumlah target yang diminta meningkat dari tahun sebelumnya (target 2023 = 64.25% menjadi target 2024 = 65.04%). Namun, dari segi capaian mencapai hingga 80,47% dan Jumlah Pertumbuhan UMKM Naik Kelas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2023 = 500 UMKM menjadi tahun 2024 = 700 UMKM). Adapun hasil ini diperoleh dari beberapa kriteria yaitu: Legalitas Usaha, Pemasaran, SDM Berkualitas, Pembiayaan Modal.	Adapun solusi yang dilakukan yaitu: 1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang membantu fasilitasi legalitas Usaha UMKM Deli Serdang seperti: NIB (Nomor Induk Berusaha), SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), Halal, BPOM dan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>HAKI.</p> <p>2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang membantu fasilitasi pemasaran produk UMKM di Deli Serdang melalui pemasaran offline di Pojok UKM Deli Serdang dan online di www.deliserdangmall.com serta promosi produk UMKM Deli Serdang ke Tribun Medan, Radio DSB Lubuk Pakam dan Pameran/ Bazar baik dalam daerah maupun luar daerah.</p> <p>3. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan pelatihan untuk mengembangkan skill dan pengetahuan UMKM Deli</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>Serdang baik dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kementerianian.</p> <p>4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang membantu UMKM mendapatkan akses permodalan dengan bekerjasama dengan pihak Bank. Hal ini dilakukan dengan memberikan Sosialisasi KUR kepada UMKM Deli Serdang.</p>
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	83.07	80.95	97.45	<p>Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan jumlah target yang diminta meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2023 = 81.24% menjadi target 2024 = 83.07). Namun, dari segi capaian mencapai hingga 97.45%. Selain itu, juga dikarenakan terdapat koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Beberapa diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman</p>	<p>Adapun solusi yang dilakukan yaitu :</p> <p>1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang membantu memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada pengurus koperasi melalui Pelatihan</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pengurus untuk menyusun laporan keuangan koperasi.	Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi 2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberkan Surat Himbauan kepada seluruh Gerakan Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya selambat-lambatnya 6 bulan setelah tutup buku. 3. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan Penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berkeinginan mendirikan koperasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan koperasi baru. 4. Dinas Koperasi dan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							UKM Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada koperasi se-Kabupaten Deli Serdang. Buku Panduan ini diberikan kepada Gerakan Koperasi untuk dipedomani.
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	88.5	107.92	Faktor Keberhasilan: Melakukan Peningkatan Disiplin Aparatur, Pelayanan Kedinasan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	84	68.19	81.17	Faktor Keberhasilan: Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan tim satgas AKIP yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan pendampingan pada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan, RKA-PD, Perjanjian Kinerja, dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian penjelasan tabel :

Terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Namun demikian, capaian masing-masing indikator kinerja tersebut sudah sangat tinggi dan sangat baik dapat dilihat dari persentase capaian masing-masing indikator kinerja mencapai >80%.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	65.04	52.34	80.47	1.082.269.518	241.596.016	22.32	
2	Persentase Koperasi Aktif	83.07	80.95	97.45	72.210.007	0	0	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	88.5	107.92	7.095.118.921	4.924.780.799	69.41	
4	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	84	68.19	81.17	71.127.300	63.754.660	89.63	

Sumber : *Capaian IKU dan Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel:

Terdapat beberapa pagu anggaran yang tidak terserap dengan baik dikarenakan adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan prioritas lainnya (*Self Blocking*).

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Poin	82	Menunjang	
a			100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100	Menunjang	
-			4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-			5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Menunjang	
b			100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	Menunjang	
-			27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	27	Menunjang	
-			5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Menunjang	
c			100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	-	-	
-			41	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	-	-	
d			100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	Menunjang	
-			10	Penyediaan Komponen	Jumlah Komponen Alat	-	-	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik Penerangan Bangunan Kantor			
-			12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	
-			5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-	
-			46	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	46	Menunjang	
-			8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8	Menunjang	
-			2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Menunjang	
-			7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	7	Menunjang	
-			804	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	804	Menunjang	
e			-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana	-	-	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Kantor			
-			-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	-	-	
-			3	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	-	-	
-			-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	-	-	
-			-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat Operasional	-	-	
f			-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	-	-	
-			90	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	-	-	
-			3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon/ Internet, Air dan Listrik	3	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-			7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor	7	Menunjang	
g			100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100	Menunjang	
-			1764	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung dan Halaman	-	-	
-			56	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	56	Menunjang	
-			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	3	Menunjang	
2	Meningkat	Jumlah	355	PROGRAM	Jumlah	-	-	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	nya Pengawasan Koperasi	Koperasi Aktif		PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi Aktif			
a			100	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	-	-	
-			25	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
3	Meningkat nya Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi Sehat	14	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Jumlah Koperasi Sehat	14	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KSP/USP Koperasi			KOPERASI				
a			25	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	25	Menunjang	
-			25	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25	Menunjang	
4	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Pengelola yang bersertifika	50	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengelola yang bersertifikat	50	Menunjang	
a			40	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pengetahuan tentang perkoperasian	40	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				ta				
-			40	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40	Menunjang	
5	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	40	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	40	Menunjang	
a			50	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Koperasi Yang Meningkat	50	Menunjang	
-			50	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	50	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
-			10	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah Kabupaten/Kota	-	-	
6	Meningkat nya Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah Usaha Mikro Baru	80	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	80	Menunjang	
a			645	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	645	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-			125	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	125	Menunjang	
-			440	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	440	Menunjang	
-			80	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80	Menunjang	
-			57	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	57	Menunjang	
7	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	260	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	260	Menunjang	
a			70	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha	Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Skala Usaha	70	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kecil				
-			70	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	70	Menunjang	

Sumber : *Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel:

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dan menunjang tercapainya target kinerja. Meskipun terdapat beberapa sub kegiatan tidak mencapai target dikarenakan pagu anggaran yang belum memadai dan adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan prioritas lainnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.166.246.221	4.988.535.459	69.61
-	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.127.300	63.754.660	89.63

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.418.438.219	4.129.634.069	76.21
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.750.000	0	0
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	729.308.120	310.467.816	42.57
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.161.100	0	0
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.489.482	373.433.352	94.18
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.972.000	111.245.562	38.36
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	72.210.007	0	0
-	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.210.007	0	0
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	44.592.996	43.707.996	98.01

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.592.996	43.707.996	98.01
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	115.966.344	62.706.322	54.07
-	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.966.344	62.706.322	54.07
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	296.003.844	62.631.322	21.15
-	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	296.003.844	62.631.322	21.15
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.413.280.766	1.081.359.229	76.5
-	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	1.413.280.766	1.081.359.229	76.5

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.082.269.518	241.596.016	22.32
-	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.082.269.518	241.596.016	22.32

Sumber : *Realisasi Fisik Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel:

Ada 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH sepanjang Tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut telah terealisasi dengan baik dan mencapai tingkat capaian yang memuaskan. Meskipun terdapat beberapa anggaran kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 50%, hal ini dikarenakan pagu anggaran yang belum memadai dikarenakan adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan prioritas lainnya. Namun demikian, tidak menjadi hambatan yang serius bagi pelaksanaan operasional maupun pelaksanaan teknis Perangkat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan seluruh sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tidak ada yang terlalu signifikan, namun terdapat penghambat dilingkup eksternal yaitu terbatasnya permodalan dan sarana prasarana produksi yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi penghambat dalam pengembangan usaha.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik intern, sektoral, maupun lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran.
2. Mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan.
3. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait.
4. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan.
5. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya.
6. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

LUBUK PAKAM, Februari 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG



Adela Sari Lubis
ADELA SARI LUBIS, S.Tr. Keb., M.K.M
NIP. 19711111 199303 2 010

Lampiran 1, Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADELA SARI LUBIS S.Tr.,M.K.M
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.M. ALI YUSUF SIREGAR
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, 2024



H.M. ALI YUSUF SIREGAR



ADELA SARI LUBIS S.Tr.,M.K.M
NIP. 19711111 199303 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas,	1. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Binaan.	65,04%
2.	Meningkatnya Koperasi Aktif.	2. Persentase Koperasi Aktif.	83,07%
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Poin
4.	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Nilai

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Peningkat Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 1.166.230.981	APBD
2	Program Penguatan dan Pemerikaaan Koperasi	Rp. 72.210.007	APBD
3	Program Penguatan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 44.592.996	APBD
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkorporasian	Rp. 115.955.344	APBD
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 296.019.084	APBD
6	Program Pembudayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.	Rp. 1.063.280.700	APBD
7	Program Penguatungan UMKM	Rp. 1.082.260.518	APBD

Lubuk Pakam,

2024



SUPATI DELI SERDANG

H.M. ALI YUSUF SIREGAR



**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**ADELA SARI LUBIS., S.Tr.M.K.M
NIP. 19711111 199303 2 010**

Lampiran 2, Indikator Utama Kinerja Tahun 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas}}{\text{Total Usaha Mikro Naik Kelas}} \times 100\%$	65,04%
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100\%$	83,07%
3	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Survey	84 Nilai
	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey	82 Poin

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG



ADELA SARI LUBIS, S.Tr.Keb., M.K.M
PEMBAWA
NIP. 19711111 199303 2 010

Lampiran 3, LHE SAKIP Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20514
Telepon: (061) 7951045 Faksimile: (061) 7951046
Email: inspektordeliserdang@gmail.com Laman: <http://inspektordeliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 22 Juli 2024

Nomor : 800.1.11.1/LHE, WKP - 172 / (WKP) / 2024
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Deli Serdang

d-
Lubuk Pakam

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 800.1.11.1/DD/126/2024 tanggal 12 Juni 2024.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan,

serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi pelaksanaan SAKIP di setiap instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan Evaluasi.

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government).

Sasaran evaluasi AKIP adalah:

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

e. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

f. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Struktur Organisasi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi:

- a) Sub Bagian Umum;
- b) Sub Bagian Program
- c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Kelembagaan dan usaha Koperasi, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa unit kerja yang bersangkutan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja baru dilaksanakan hingga level eselon 2/unit kerja.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Bersama dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang juga memberikan rekomendasi untuk ditingkatkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan status sebagai berikut :

No.	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
a) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja		
1	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu	Belum ditingkatkan
2	Membuat ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) yang memenuhi kriteria SMART	Sudah ditingkatkan
3	Membuat Dokumen Perencanaan Kinerja yang mengembanakan tubungan yang berkembang, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	Sudah ditingkatkan
4	Membuat Perencanaan Kinerja yang memberikan informasi tentang tubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Sudah ditingkatkan
b) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja		
1	Membuat Pengukuran Kinerja yang secara nyata mempengaruhi penyusunan (Relocussing) organisasi, strategi dalam mencapai kinerja, bahkan dalam mencapai kinerja, aktivitas dalam mencapai kinerja.	Belum ditingkatkan

No.	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
	anggaran dalam mencapai kinerja.	
2	Meninjau setiap unit/ruas kerja yang sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah diindaklanjuti
3	Menyosialisasikan setiap pegawai belum agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah diindaklanjuti
6)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi oleh AP/PP dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Sudah diindaklanjuti

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- a. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,19** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi SAKIP masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,69	22,68
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,84	19,66
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,66	10,96
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,13	16,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,22	68,19
Predikat SAKIP			BB	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun perencanaan kinerja yang tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 dan selanjutnya pada tingkat OPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada Renstra Perubahan yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Aksi (Renaksi). Namun demikian masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a) Meskipun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyusun dokumen Renstra Perubahan namun tidak sepenuhnya menyajikan target kinerja pada indikator persentase usaha mikro nak kelas binaan dan persentase koperasi aktif untuk target tahun 2020 belum tersaji.

- b) Penetapan rencana aksi belum sepenuhnya selaras untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada PK, hal ini dikarenakan terdapat sasaran yang tidak sesuai dengan sasaran pada Renstra Perubahan, Renja.PK dimana pada dokumen Rencana aksi hanya mempunyai 3 sasaran dari 4 sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen lainnya yaitu sasaran "Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah".
- c) Penetapan target pada PK tidak selaras dengan target pada Renstra, Renja dan rencana aksi yaitu pada dokumen Renstra, Renja dan Rencana Aksi target pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82% sedangkan pada PK sebesar 84% dan target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Renstra, Renja dan Rencana Aksi sebesar 84 sedangkan pada PK sebesar 82.

2) **Pengukuran Kinerja**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerjanya, namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a) Meskipun indikator Kinerja Utama (IKU) telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan indikator namun sasaran yang terdapat pada IKU tidak selaras dengan sasaran pada Renstra Perubahan.
- b) Aplikasi PAKDe dan e-SAKIP belum dimanfaatkan untuk pengumpulan data kinerja serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
- c) Penetapan sasaran antara dokumen IKU dan PK 2024 tidak selaras yaitu dalam IKU terdapat indikator Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah sedangkan di dalam PK terdapat sasaran meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah dan meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja kurang menantang. Pada indikator Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 dan 2023 telah terealisasi masing-masing sebesar 79,67 dan 86,04. Akan tetapi pencantuman nilai target tahun 2024 hanya sebesar 82 atau dibawah nilai yang telah dicapai tahun 2022 dan 2023.
- e) Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyusun laporan kinerja tahun 2023, namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a) Laporan kinerja belum dipublikasikan melalui website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b) Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya diindaklanjuti.
- b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja:

- a) Menyelaraskan sasaran pada rencana aksi dengan sasaran pada Renstra Perubahan, Renja dan PK.
- b) Menyelaraskan penetapan target pada PK dengan target pada Renstra Perubahan, Renja dan Rencana Aksi.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Menyelaraskan sasaran pada IKU dengan sasaran pada renstra Perubahan.
- b) Memanfaatkan aplikasi PAKDe dan e-SAKIP untuk pengumpulan data kinerja serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
- c) Menyelaraskan sasaran pada IKU dengan sasaran pada PK
- d) Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Mempublikasikan laporan kinerja melalui website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar mudah diakses oleh masyarakat.
- b) Memanfaatkan pelaporan kinerja dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- b) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

3. PENUTUP

a. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 masuk dalam kategori Baik dengan predikat B (88,19). Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

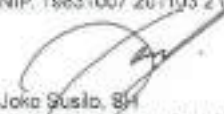

Demiikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**MENGETAHUI :**
INSPEKTUR KABUPATEN DELI-SERDANG

H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010

TIM PEMERIKSA :

- 
1. Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum
NIP. 19820912 200502 2 002
- 
2. Jurniyati, SE, M.Si
NIP. 19631007 201103 2 001
- 
3. Joko Susilo, SH
NIP. 19611226 201101 1 010
- 
4. Samuel Perdomo Sinaga, SE, M.Si
NIP. 19610319 200312 1 006

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth.P: Bupati Deli Serdang
2. Arsip

Lampiran 4, Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM TAHUN 2024

NRR Per Unsur			
No.	Unsur Pelayanan	Actual Masyarakat	
		Indeks Konversi	Mutu
1.	Persyaratan Pelayanan	3.477	B
2.	Prosedur Pelayanan	3.415	B
3.	Waktu Pelayanan	3.327	B
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3.829	A
5.	Produk Jenis Layanan	3.469	B
6.	Kompetensi Pelaksana	3.442	B
7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3.442	B
8.	Sarana dan Prasarana	3.407	B
9.	Penanganan Pengaduan, Saran	3.955	A

